

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : <https://doi.org/10.51747/6e458h21>

**PENGELOLAAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN
SUNGAI SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI DESA UPANG MAKMUR,
KECAMATAN MAKARTI JAYA, KABUPATEN
BANYUASIN**

Irawan ¹, Masayu Adiah ², Lies Nur Intan ³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tamansiswa Palembang ¹⁻³

korespondensi: irawan.irawan@gmail.com

ABSTRAK

Transportasi penyeberangan sungai merupakan salah satu potensi lokal yang dapat berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Desa Upang Makmur, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin memiliki sejumlah jalur penyeberangan sungai yang strategis untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan PAD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan transportasi penyeberangan sungai sebagai sumber PAD, termasuk mekanisme pengelolaan, hambatan yang dihadapi, dan strategi optimalisasi pendapatan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara dengan pengelola penyeberangan dan aparat desa, serta studi dokumentasi terkait pendapatan dan regulasi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan transportasi penyeberangan telah memberikan kontribusi terhadap PAD, tetapi masih terdapat kendala terkait manajemen operasional, keterbatasan fasilitas, dan regulasi yang perlu diperkuat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pengelola, pemeliharaan fasilitas, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk memaksimalkan PAD dari transportasi penyeberangan.

Kata Kunci: transportasi penyeberangan, Pendapatan Asli Daerah, pengelolaan transportasi, desa, pengelolaan PAD

1. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan salah satu infrastruktur dasar yang memiliki peran penting dalam membentuk konektivitas wilayah, mobilitas penduduk, serta akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi dan pelayanan publik. Dalam konteks wilayah perdesaan yang memiliki karakter geografis berupa sungai, rawa, dan keterbatasan konektivitas jalan darat, transportasi air tidak hanya berfungsi sebagai alternatif moda transportasi, tetapi dapat menjadi bagian utama dari sistem mobilitas masyarakat. Transportasi

yang tersedia dan dapat diandalkan memungkinkan masyarakat mengakses pasar, pusat pelayanan pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta berbagai aktivitas ekonomi. Dengan demikian, persoalan transportasi di wilayah perdesaan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis mobilitas, tetapi juga berkaitan dengan aksesibilitas, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi lokal (??).

Karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menyebabkan kebutuhan terhadap berbagai moda transportasi menjadi sangat beragam. Di sejumlah wilayah yang memiliki jaringan sungai yang luas, transportasi sungai tetap memiliki fungsi strategis karena mampu menghubungkan permukiman yang secara geografis dipisahkan oleh badan air. Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa angkutan sungai dan danau memiliki peran strategis dalam menghubungkan wilayah, terutama wilayah yang memiliki keterbatasan konektivitas, serta mendukung kelancaran arus barang dan jasa. Pengembangan transportasi sungai karena itu tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana angkutan, tetapi juga membutuhkan dukungan prasarana, keselamatan, tata kelola, dan kelembagaan yang memadai (?).

Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik geografis yang mendukung pentingnya transportasi perairan. Kondisi wilayah yang memiliki jaringan sungai dan kawasan perdesaan menyebabkan transportasi air tetap menjadi bagian dari mobilitas masyarakat. Kecamatan Makarti Jaya, termasuk Desa Upang Makmur, merupakan salah satu wilayah yang menunjukkan karakter tersebut. Data transportasi Kecamatan Makarti Jaya menunjukkan bahwa Desa Upang Makmur dapat diakses melalui transportasi darat dan air serta memiliki angkutan umum dengan trayek tetap. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa transportasi air bukan sekadar moda alternatif, tetapi menjadi bagian dari sistem konektivitas antarwilayah bagi masyarakat setempat (?).

Secara lebih spesifik, Desa Upang Makmur memiliki keterkaitan yang kuat dengan Sungai Telang. Sungai tersebut menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat dan dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi air untuk mendukung mobilitas masyarakat menuju wilayah tujuan. Berbagai moda transportasi air digunakan oleh masyarakat, antara lain sampan, perahu bermotor, jukung, dan speed boat. Karakter tersebut menunjukkan bahwa aktivitas transportasi sungai memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sekaligus melekat pada kehidupan masyarakat desa. Transportasi sungai tidak hanya memindahkan orang dan barang, tetapi juga memungkinkan berlangsungnya aktivitas perdagangan, distribusi hasil produksi, serta interaksi ekonomi antarkawasan (?).

Urgensi transportasi sungai di wilayah tersebut juga terlihat dari pengembangan infrastruktur transportasi yang dilakukan pemerintah. Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan melakukan peninjauan lokasi dalam rangka pembangunan Pelabuhan Sungai Upang dan Pelabuhan Sungai Salek tahap II. Pengembangan tersebut diarahkan untuk meningkatkan konektivitas transportasi sungai, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, dan memperkuat aksesibilitas antarwilayah di Kabupaten Banyuasin. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa transportasi sungai masih memiliki posisi penting dalam agenda pembangunan dan pelayanan transportasi daerah (?).

Di sisi lain, keberadaan aktivitas transportasi sungai juga memiliki dimensi ekonomi bagi pemerintah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan pendapatan asli desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Pendapatan asli desa antara lain dapat bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi masyarakat, serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Pengelolaan aset dan potensi ekonomi desa pada prinsipnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Oleh

karena itu, pengelolaan potensi ekonomi lokal perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kapasitas fiskal desa (?).

Dalam konteks transportasi penyeberangan, potensi pendapatan desa dapat berkaitan dengan pengelolaan aset, jasa pelayanan, maupun aktivitas ekonomi yang berada dalam kewenangan desa. Namun, potensi tersebut tidak secara otomatis berubah menjadi pendapatan desa. Diperlukan mekanisme pengelolaan yang jelas, dasar hukum pemungutan yang tepat, sistem pencatatan yang tertib, transparansi penerimaan, pengawasan, serta pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah desa, pengelola transportasi, dan pihak-pihak terkait. Pengelolaan aset desa sendiri harus memperhatikan prinsip kepentingan umum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta kepastian nilai ekonomi (?).

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika aktivitas transportasi memiliki volume penggunaan yang relatif tinggi, tetapi sistem pengelolaannya masih bersifat sederhana. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai Desa Upang Makmur, transportasi sungai telah digunakan masyarakat untuk mendukung mobilitas sehari-hari, sementara pengelolaan transportasi masih menghadapi persoalan yang berkaitan dengan pelayanan dan pengelolaan. Kondisi geografis yang menjadikan sungai sebagai jalur mobilitas utama menyebabkan kualitas pengelolaan transportasi berpengaruh langsung terhadap kemudahan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial (?).

Permasalahan pengelolaan juga tidak dapat dilepaskan dari aspek kelembagaan. Pengelolaan transportasi penyeberangan membutuhkan koordinasi antara pemerintah desa, pengelola atau operator, masyarakat pengguna, serta pemerintah daerah dan instansi teknis. Masing-masing aktor memiliki kepentingan dan kewenangan yang berbeda. Pemerintah desa berkepentingan memastikan pelayanan publik dan pengelolaan potensi desa berjalan secara akuntabel, operator berkepentingan terhadap keberlanjutan kegiatan operasional, sedangkan masyarakat membutuhkan layanan yang aman, terjangkau, dan dapat diandalkan. Tanpa pembagian peran dan mekanisme pengawasan yang jelas, potensi ekonomi dari transportasi penyeberangan dapat tidak terkelola secara optimal.

Selain aspek pendapatan, aspek pelayanan publik juga menjadi persoalan penting. Transportasi penyeberangan merupakan layanan yang secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaannya tidak cukup hanya dinilai dari besarnya penerimaan yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan menyediakan layanan yang aman, teratur, mudah diakses, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perspektif pelayanan publik menempatkan pemerintah bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai institusi yang harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dan layanan publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Dwiyanto, 2017).

Dengan demikian, terdapat dua kepentingan yang harus dikelola secara bersamaan dalam transportasi penyeberangan di Desa Upang Makmur. Pertama, transportasi harus mampu menjalankan fungsi pelayanan publik dengan memberikan akses mobilitas yang aman dan dapat diandalkan bagi masyarakat. Kedua, aktivitas tersebut perlu dikelola secara tertib dan akuntabel apabila menghasilkan penerimaan yang menjadi hak desa. Ketegangan antara orientasi pelayanan dan orientasi penerimaan inilah yang menjadikan pengelolaan transportasi penyeberangan menarik untuk dikaji dalam perspektif administrasi publik.

Permasalahan tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam penelitian terdahulu. Kajian mengenai transportasi sungai pada umumnya menempatkan transportasi sebagai instrumen konektivitas, mobilitas, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, kajian mengenai pendapatan desa lebih banyak membahas optimalisasi aset desa, BUM Desa, dan sumber pendapatan desa lainnya. Penelitian

yang secara khusus menghubungkan pengelolaan transportasi penyeberangan sungai dengan pengelolaan pendapatan asli desa, kualitas pelayanan, mekanisme pemungutan, akuntabilitas, serta faktor penghambat pengelolaannya pada tingkat desa masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya mengenai Upang Makmur telah menunjukkan keberadaan transportasi air sebagai bagian penting dari mobilitas masyarakat, tetapi masih diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana tata kelola transportasi tersebut dapat dikembangkan sebagai sumber penerimaan desa tanpa mengurangi fungsi utamanya sebagai pelayanan publik (?).

Atas dasar tersebut, penelitian mengenai pengelolaan transportasi penyeberangan sungai di Desa Upang Makmur menjadi penting dilakukan. Penelitian ini tidak hanya diarahkan untuk melihat besarnya potensi ekonomi transportasi sungai, tetapi juga untuk memahami bagaimana mekanisme pengelolaannya, bagaimana hubungan antara pemerintah desa dan pengelola transportasi, bagaimana sistem penerimaan dan pencatatan dilakukan, serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat optimalisasi pengelolaan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan transportasi penyeberangan dipahami sebagai bagian dari tata kelola pelayanan publik dan pengelolaan potensi ekonomi lokal secara bersamaan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan transportasi penyeberangan sungai di Desa Upang Makmur, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, dengan menitikberatkan pada mekanisme pengelolaan, aspek pelayanan, pengelolaan penerimaan desa, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi optimalisasi pengelolaan transportasi penyeberangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi kajian administrasi publik, khususnya mengenai tata kelola sumber daya lokal dan pelayanan transportasi perdesaan, sekaligus memberikan masukan praktis bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam mengembangkan transportasi sungai yang aman, tertib, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam pengelolaan transportasi penyeberangan sungai di Desa Upang Makmur, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, khususnya berkaitan dengan mekanisme pengelolaan, kontribusi terhadap pendapatan desa, hambatan yang dihadapi, serta upaya optimalisasi pengelolaannya. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris pengelolaan transportasi penyeberangan sekaligus menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi keberlangsungannya. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Upang Makmur karena transportasi penyeberangan sungai memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal. Informan penelitian dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pengelolaan transportasi penyeberangan, yang meliputi pemerintah desa, pengelola atau operator penyeberangan, serta masyarakat pengguna layanan. Pemilihan informan diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme operasional, pengelolaan penerimaan, kualitas pelayanan, hambatan pengelolaan, dan strategi pengembangan transportasi penyeberangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sarana dan prasarana, aktivitas operasional, mekanisme pelayanan, serta interaksi antara pengelola dan pengguna transportasi penyeberangan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang terlibat dalam pengelolaan transportasi untuk menggali informasi mengenai mekanisme pengelolaan, sistem penerimaan dan pencatatan, perma-

salahan operasional, serta strategi optimalisasi. Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara melalui dokumen pemerintah desa, data penerimaan, dokumen pengelolaan transportasi, peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan transportasi penyeberangan, serta dokumen lain yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif melalui proses pengorganisasian, pengelompokan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan tema penelitian. Analisis diarahkan pada lima aspek utama, yaitu mekanisme pengelolaan, produktivitas operasional, kontribusi terhadap pendapatan desa, hambatan pengelolaan, dan strategi optimalisasi. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sehingga diperoleh gambaran yang lebih konsisten mengenai kondisi pengelolaan transportasi penyeberangan di Desa Upang Makmur (Miles et al., 2019; ?).

3. TINJAUAN LITERATUR

Transportasi penyeberangan sungai merupakan bagian dari sistem transportasi yang memiliki fungsi penting dalam mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat, khususnya pada wilayah yang memiliki karakter geografis berupa sungai, rawa, dan keterbatasan jaringan jalan. Transportasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana perpindahan orang dan barang, tetapi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pelayanan publik. Dalam konteks wilayah perdesaan, keberadaan transportasi yang dapat diakses secara teratur dan aman dapat memperkuat keterhubungan antara masyarakat dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan. Oleh karena itu, pengelolaan transportasi penyeberangan perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan wilayah, bukan semata-mata sebagai aktivitas ekonomi (??).

Pengelolaan transportasi sungai pada dasarnya mencakup serangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kegiatan transportasi. Pengelolaan tersebut mencakup aspek penyediaan sarana dan prasarana, pengaturan operasional, keselamatan, penetapan mekanisme pelayanan, pengelolaan sumber daya manusia, serta hubungan antara pengelola dengan pengguna layanan. Kementerian Perhubungan menempatkan angkutan sungai dan danau sebagai bagian dari sistem transportasi yang membutuhkan pengaturan mengenai penyelenggaraan angkutan, prasarana pelabuhan, keselamatan, serta tata kelola operasional. Dengan demikian, kualitas pengelolaan transportasi penyeberangan sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi yang bertanggung jawab dalam mengintegrasikan aspek teknis, administratif, dan pelayanan masyarakat (?).

Dalam perspektif administrasi publik, transportasi penyeberangan dapat dipahami sebagai bentuk pelayanan publik karena keberadaannya berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan mobilitas masyarakat. Dwiyanto (2017) menjelaskan bahwa kinerja organisasi publik tidak hanya berkaitan dengan pencapaian output, tetapi juga dengan kualitas pelayanan, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, responsibilitas terhadap aturan dan prosedur, serta akuntabilitas organisasi. Kerangka tersebut relevan untuk menganalisis pengelolaan transportasi penyeberangan karena keberhasilan pengelolaan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah pengguna atau besarnya penerimaan, tetapi juga berdasarkan kemampuan penyelenggara menyediakan pelayanan yang aman, teratur, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, aspek pelayanan publik menjadi salah satu dimensi penting dalam mengevaluasi pengelolaan transportasi penyeberangan di tingkat desa.

Selain sebagai pelayanan publik, transportasi penyeberangan juga memiliki potensi ekonomi yang

dapat dikembangkan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya lokal. Desa memiliki kewenangan untuk mengelola berbagai potensi dan aset yang berada dalam lingkup kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan pendapatan asli desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (?). Oleh karena itu, pemanfaatan potensi transportasi penyeberangan sebagai sumber penerimaan desa harus dilihat dalam kerangka pengelolaan potensi lokal yang memperhatikan aspek legalitas, kepentingan masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Pengelolaan pendapatan desa memiliki hubungan erat dengan kemampuan pemerintah desa dalam mengidentifikasi, mengembangkan, mencatat, dan mempertanggungjawabkan sumber-sumber penerimaan yang dimiliki. Pengelolaan keuangan desa menuntut adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Dalam konteks transportasi penyeberangan, prinsip tersebut menjadi penting karena penerimaan yang berasal dari aktivitas pelayanan transportasi harus memiliki dasar pengelolaan yang jelas, mekanisme pemungutan yang dapat dipertanggungjawabkan, sistem pencatatan yang tertib, serta mekanisme pelaporan dan pengawasan yang memadai. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola administrasi dan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola sumber daya lokal (?).

Konsep optimalisasi dalam pengelolaan transportasi penyeberangan tidak semata-mata berarti meningkatkan jumlah penerimaan. Optimalisasi perlu dipahami sebagai upaya meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial dari suatu sumber daya dengan tetap mempertahankan fungsi pelayanan publiknya. Dalam konteks Desa Upang Makmur, transportasi penyeberangan memiliki dua fungsi yang saling berkaitan, yaitu fungsi mobilitas masyarakat dan fungsi ekonomi lokal. Apabila orientasi peningkatan penerimaan dilakukan tanpa memperhatikan keterjangkauan tarif, keselamatan, kualitas sarana, dan kebutuhan masyarakat, maka peningkatan pendapatan dapat berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap pelayanan. Sebaliknya, apabila transportasi hanya dipandang sebagai pelayanan tanpa memperhatikan efisiensi pengelolaan dan potensi penerimaannya, peluang untuk memperkuat kapasitas ekonomi desa dapat tidak dimanfaatkan secara optimal.

Pengelolaan transportasi penyeberangan juga dapat dianalisis melalui perspektif tata kelola kolaboratif. Aktivitas transportasi pada tingkat lokal melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah desa, pengelola atau operator, masyarakat pengguna, kelompok masyarakat, hingga pemerintah daerah dan instansi teknis. Setiap aktor memiliki sumber daya, kepentingan, dan kewenangan yang berbeda. Pemerintah desa memiliki fungsi pengaturan dan pengelolaan kepentingan masyarakat desa, sementara operator memiliki peran dalam menjalankan pelayanan transportasi dan masyarakat memiliki posisi sebagai pengguna sekaligus pihak yang terdampak oleh kebijakan pengelolaan. Karena itu, keberhasilan pengelolaan transportasi membutuhkan koordinasi dan pembagian peran yang jelas antarpemangku kepentingan. Pendekatan tata kelola tersebut sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan orientasi pada kepentingan publik (Dwiyanto, 2017).

Dalam konteks Desa Upang Makmur, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transportasi penyeberangan sungai memiliki posisi penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Sungai dan moda transportasi air digunakan untuk menghubungkan masyarakat dengan berbagai aktivitas dan tujuan perjalanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan transportasi sungai memiliki nilai sosial dan ekonomi sekaligus. Namun, keberadaan potensi tersebut belum dengan sendirinya menjamin terciptanya pengelolaan yang efektif. Diperlukan mekanisme kelembagaan yang mampu mengatur operasional, fa-

silitas, keselamatan, pembiayaan, penerimaan, dan hubungan antara pengelola dengan pemerintah desa (?).

Berdasarkan kajian tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan transportasi penyeberangan sungai merupakan fenomena multidimensional yang menggabungkan aspek pelayanan publik, pengelolaan sumber daya lokal, tata kelola pemerintahan desa, dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Kerangka literatur dalam penelitian ini karena itu menempatkan pengelolaan transportasi sebagai proses yang mencakup mekanisme operasional, kualitas pelayanan, pengelolaan penerimaan, akuntabilitas, serta faktor pendukung dan penghambat. Kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana transportasi penyeberangan di Desa Upang Makmur dikelola, sejauh mana aktivitas tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat dan desa, serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaannya tanpa mengurangi fungsi transportasi sebagai pelayanan publik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kontribusi Transportasi Penyeberangan terhadap Pendapatan Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transportasi penyeberangan sungai di Desa Upang Makmur memiliki fungsi ekonomi selain fungsi utamanya sebagai sarana mobilitas masyarakat. Aktivitas penyeberangan memberikan penerimaan melalui retribusi penyeberangan, izin operasional perahu, dan pungutan jasa yang berkaitan dengan pelayanan transportasi. Berdasarkan data yang disajikan dalam penelitian, penerimaan dari aktivitas transportasi sungai berada pada kisaran 12–15% dari total pendapatan yang dicatat sebagai PAD desa setiap tahunnya. Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa transportasi penyeberangan merupakan salah satu potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat kapasitas pendapatan desa.

Tabel 1: Kontribusi Transportasi Penyeberangan terhadap Pendapatan Desa

Aspek	Temuan	Keterangan
Sumber penerimaan	Retribusi penyeberangan	Penerimaan berasal dari aktivitas pelayanan penyeberangan masyarakat.
Izin operasional	Penerimaan izin operasional perahu	Berkaitan dengan aktivitas operasional transportasi penyeberangan.
Jasa tambahan	Pungutan jasa transportasi	Penerimaan berasal dari jasa yang berkaitan dengan aktivitas penyeberangan.
Kontribusi terhadap pendapatan desa	12–15%	Berdasarkan data desa yang disajikan dalam penelitian.
Pemanfaatan penerimaan	Infrastruktur dan fasilitas umum	Penerimaan dapat mendukung pembangunan fasilitas yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa transportasi penyeberangan memiliki nilai ekonomi yang cukup penting dalam struktur pendapatan desa. Namun, potensi penerimaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kualitas pengelolaannya. Semakin baik mekanisme pelayanan, pencatatan penerimaan, pengawasan, dan pengelolaan operasional, semakin besar peluang pemerintah desa untuk memperoleh penerimaan secara tertib dan transparan. Dengan demikian, optimalisasi transportasi penyeberangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah pengguna, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah desa

membangun sistem pengelolaan yang dapat memastikan bahwa aktivitas ekonomi tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat dan desa.

Temuan tersebut sejalan dengan perspektif pengelolaan sumber daya lokal yang menempatkan potensi ekonomi wilayah sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat dan pemerintah lokal. Dalam perspektif pelayanan publik, aktivitas transportasi juga harus tetap mempertahankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Dwiyanto (2017) menempatkan kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas sebagai bagian penting dalam menilai kinerja organisasi publik. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan dari transportasi penyeberangan perlu berjalan bersama dengan peningkatan kualitas pelayanan.

4.2. Mekanisme Pengelolaan Transportasi Penyeberangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan transportasi penyeberangan di Desa Upang Makmur dilakukan melalui kerja sama antara pengelola lokal dan pemerintah desa. Mekanisme pengelolaan mencakup penetapan tarif penyeberangan, penerimaan retribusi, pencatatan penerimaan, serta pengaturan jadwal operasional. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa aktivitas transportasi telah memiliki pola pengelolaan tertentu, meskipun sebagian proses administrasinya masih dilakukan secara manual.

Tabel 2: Mekanisme Pengelolaan Transportasi Penyeberangan

Komponen	Bentuk Pengelolaan	Permasalahan
Penetapan tarif	Dilakukan melalui pemerintah desa	Membutuhkan sosialisasi dan kepastian aturan.
Pemungutan penerimaan	Dilakukan melalui aktivitas pelayanan penyeberangan	Membutuhkan mekanisme pencatatan yang lebih tertib.
Pencatatan penerimaan	Masih dilakukan secara manual	Berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan.
Operasional harian	Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat	Membutuhkan koordinasi antara pengelola dan pemerintah desa.
Pengawasan	Melibatkan pemerintah desa dan pengelola	Masih membutuhkan penguatan sistem monitoring.

Pencatatan penerimaan yang masih dilakukan secara manual menjadi salah satu persoalan dalam pengelolaan transportasi penyeberangan. Sistem manual memiliki keterbatasan dalam hal ketepatan, kecepatan, dokumentasi, dan pengawasan. Kondisi tersebut dapat menyulitkan pemerintah desa ketika melakukan rekonsiliasi antara jumlah aktivitas penyeberangan dengan penerimaan yang diperoleh. Oleh karena itu, penguatan sistem administrasi merupakan salah satu kebutuhan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan transportasi.

Dari perspektif administrasi publik, persoalan tersebut berkaitan dengan dimensi akuntabilitas dan responsibilitas. Akuntabilitas menuntut agar setiap penerimaan dan aktivitas pelayanan dapat dicatat serta dipertanggungjawabkan, sedangkan responsibilitas menuntut agar pengelolaan dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku (Dwiyanto, 2017). Dengan demikian, peningkatan kualitas administrasi bukan sekadar persoalan teknis pencatatan, tetapi merupakan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan desa.

4.3. Hambatan dalam Pengelolaan Transportasi Penyeberangan

Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa hambatan yang memengaruhi pengelolaan transportasi penyeberangan di Desa Upang Makmur. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan resmi, serta aspek kebijakan dan regulasi.

Tabel 3: Hambatan Pengelolaan Transportasi Penyeberangan

Hambatan	Kondisi	Dampak
Infrastruktur	Kondisi dermaga dan sarana transportasi masih terbatas	Membatasi kapasitas dan kualitas pelayanan.
Sumber daya manusia	Keterbatasan kemampuan administrasi dan pengawasan	Menghambat pencatatan dan pengendalian penerimaan.
Partisipasi masyarakat	Sebagian masyarakat tidak menggunakan layanan resmi	Berpotensi mengurangi penerimaan yang diterima desa.
Regulasi	Aturan mengenai tarif dan operasional membutuhkan penguatan sosialisasi	Menimbulkan potensi ketidakseragaman dalam pelaksanaan.

Keterbatasan infrastruktur merupakan hambatan yang berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan. Kondisi dermaga yang belum memadai dan keterbatasan sarana transportasi dapat membatasi kapasitas pelayanan serta memengaruhi kenyamanan dan keamanan pengguna. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan desa tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan investasi dan pemeliharaan fasilitas transportasi. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menciptakan kondisi yang lebih mendukung bagi keberlanjutan aktivitas ekonomi transportasi.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia. Pengelola transportasi tidak hanya membutuhkan kemampuan operasional, tetapi juga kemampuan administrasi, pencatatan, pengawasan, dan pelaporan. Keterbatasan pada aspek tersebut dapat menyebabkan sistem pengelolaan penerimaan belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas pengelola merupakan bagian penting dari strategi penguatan tata kelola transportasi penyeberangan.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting. Ketika sebagian masyarakat memilih menggunakan layanan yang tidak tercatat atau tidak melalui mekanisme resmi, pemerintah desa dapat kehilangan potensi penerimaan. Persoalan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa optimalisasi pendapatan tidak dapat dilakukan hanya melalui instrumen administratif. Diperlukan penerimaan dan partisipasi masyarakat terhadap sistem pelayanan yang telah ditetapkan. Karena itu, sosialisasi mengenai tarif, prosedur pelayanan, manfaat layanan resmi, serta penggunaan penerimaan perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Aspek regulasi juga berpengaruh terhadap pengelolaan transportasi penyeberangan. Aturan mengenai tarif, izin operasional, mekanisme penerimaan, dan pembagian kewenangan perlu dipahami oleh pengelola maupun masyarakat. Ketidakjelasan atau lemahnya sosialisasi aturan dapat menyebabkan implementasi kebijakan tidak seragam. Dalam perspektif good governance, kejelasan aturan dan keterbukaan informasi merupakan bagian penting untuk membangun pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.4. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Transportasi Penyeberangan

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan transportasi penyeberangan. Strategi tersebut meliputi peningkatan kapasitas pengelola, perbaikan fasilitas, digitalisasi pencatatan penerimaan, sosialisasi regulasi, dan penguatan kolaborasi dengan masyarakat.

Tabel 4: Strategi Optimalisasi Pengelolaan Transportasi Penyeberangan

Strategi	Bentuk Tindakan	Tujuan
Peningkatan kapasitas pengelola	Pelatihan administrasi, pencatatan, pengawasan, dan pelaporan	Meningkatkan kapasitas pengelolaan.
Perbaikan fasilitas	Pemeliharaan dan peningkatan dermaga serta sarana penyeberangan	Meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan.
Digitalisasi penerimaan	Pencatatan dan pelaporan penerimaan secara digital	Meningkatkan akurasi dan transparansi.
Sosialisasi regulasi	Penyampaian informasi mengenai tarif dan prosedur layanan	Meningkatkan kepatuhan masyarakat.
Kolaborasi masyarakat	Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan transportasi	Meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan pengelolaan.

Peningkatan kapasitas pengelola menjadi strategi penting karena kualitas sistem pengelolaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia yang menjalankannya. Pelatihan tidak hanya diarahkan pada aspek teknis transportasi, tetapi juga pada administrasi penerimaan, pencatatan, pelaporan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan meningkatnya kapasitas pengelola, proses pengelolaan dapat dilakukan secara lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Digitalisasi pencatatan penerimaan juga dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi kelemahan sistem manual. Sistem digital memungkinkan pencatatan transaksi dilakukan secara lebih sistematis dan dapat menghasilkan basis data yang dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi. Namun, digitalisasi perlu disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta mekanisme pengawasan agar sistem yang dibangun benar-benar digunakan secara konsisten.

Perbaikan fasilitas merupakan strategi yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan pelayanan. Dermaga dan sarana transportasi yang memadai tidak hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat, tetapi juga mendukung keselamatan operasional. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan, masyarakat memiliki alasan yang lebih kuat untuk menggunakan layanan penyeberangan yang resmi dan terkelola.

Strategi selanjutnya adalah memperkuat sosialisasi regulasi dan partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai tarif, prosedur, manfaat penggunaan layanan resmi, serta tujuan pengelolaan penerimaan. Pelibatan masyarakat juga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap sistem transportasi lokal. Dengan demikian, pengelolaan transportasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan operator, tetapi menjadi bagian dari tata kelola bersama.

4.5. Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transportasi penyeberangan di Desa Upang Makmur memiliki karakter ganda, yaitu sebagai pelayanan publik dan sebagai potensi ekonomi lokal. Karakter ganda tersebut menyebabkan pengelolaan transportasi membutuhkan keseimbangan antara kepentingan pelayanan dan kepentingan penerimaan. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa aktivitas transportasi tetap dapat diakses masyarakat, tetapi pada saat yang sama memiliki sistem pengelolaan yang mampu menghasilkan penerimaan secara tertib dan transparan.

Jika dilihat dari perspektif kinerja organisasi publik, pengelolaan transportasi penyeberangan dapat dianalisis melalui produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas (Dwiyanto, 2017). Produktivitas berkaitan dengan kemampuan pengelola menjalankan aktivitas transportasi secara efektif. Kualitas pelayanan berkaitan dengan kondisi sarana, keteraturan operasional, keamanan, dan kemudahan akses masyarakat. Responsivitas berkaitan dengan kemampuan pengelola menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Responsibilitas berkaitan dengan kesesuaian pengelolaan dengan aturan dan prosedur. Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan pencatatan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban penerimaan.

Tabel 5: Analisis Pengelolaan Transportasi Berdasarkan Dimensi Kinerja Pelayanan Publik

Dimensi	Indikator dalam Penelitian	Temuan
Produktivitas	Operasional dan pemanfaatan sarana transportasi	Transportasi berfungsi mendukung mobilitas dan menghasilkan penerimaan desa.
Kualitas pelayanan	Sarana, keteraturan, keamanan, dan aksesibilitas	Masih dipengaruhi keterbatasan fasilitas.
Responsivitas	Kemampuan menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat	Operasional disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Responsibilitas	Kepatuhan terhadap aturan dan prosedur	Mebutuhkan penguatan regulasi dan sosialisasi.
Akuntabilitas	Pencatatan, pelaporan, dan pengawasan penerimaan	Sistem pencatatan masih sebagian dilakukan secara manual.

Dengan demikian, persoalan utama pengelolaan transportasi penyeberangan bukan terletak pada ketiadaan potensi ekonomi, tetapi pada bagaimana potensi tersebut dikelola melalui sistem kelembagaan yang efektif. Kontribusi penerimaan sebesar 12–15% menunjukkan adanya potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, tetapi peningkatan kontribusi tidak seharusnya dilakukan hanya melalui peningkatan pungutan. Optimalisasi perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan, perbaikan sarana, peningkatan kapasitas pengelola, tertib administrasi, digitalisasi pencatatan, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, strategi optimalisasi perlu diarahkan pada penguatan ekosistem pengelolaan transportasi secara keseluruhan. Peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas. Dengan pendekatan tersebut, transportasi penyeberangan tidak hanya diposisikan sebagai sumber penerimaan desa, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat konektivitas, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola potensi lokal.

5. KESIMPULAN

6. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa transportasi penyeberangan sungai di Desa Upang Makmur, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memiliki potensi ekonomi bagi desa. Pengelolaan transportasi dilakukan melalui keterlibatan pemerintah desa dan pengelola lokal dengan mekanisme yang meliputi penetapan tarif, pemungutan penerimaan, pencatatan, dan pengaturan operasional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, sebagian mekanisme administrasi dan pencatatan penerimaan masih dilakukan secara manual sehingga pengelolaan belum sepenuhnya optimal dari aspek efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dari sisi ekonomi, aktivitas transportasi penyeberangan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa melalui retribusi penyeberangan, izin operasional perahu, dan jasa transportasi lainnya. Berdasarkan data yang disajikan dalam penelitian, kontribusi tersebut berada pada kisaran 12–15% dari total pendapatan desa yang dicatat dalam penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa transportasi penyeberangan merupakan salah satu potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan, tetapi peningkatan penerimaan perlu tetap memperhatikan fungsi transportasi sebagai pelayanan publik bagi masyarakat.

Pengelolaan transportasi penyeberangan masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama keterbatasan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan resmi, serta aspek regulasi dan sosialisasi kebijakan. Keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, tertib administrasi, pengawasan penerimaan, dan optimalisasi potensi ekonomi transportasi penyeberangan. Oleh karena itu, pengelolaan transportasi tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan secara bersamaan.

Strategi optimalisasi yang dapat dikembangkan meliputi peningkatan kapasitas pengelola melalui pelatihan administrasi dan pengelolaan keuangan, perbaikan dan pemeliharaan sarana serta prasarana penyeberangan, digitalisasi sistem pencatatan penerimaan, penguatan sosialisasi mengenai tarif dan ketentuan operasional, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah desa, pengelola, dan masyarakat. Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan tertib pengelolaan, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan transportasi penyeberangan sekaligus memperkuat manfaat ekonomi bagi desa dan masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi transportasi penyeberangan di Desa Upang Makmur perlu ditempatkan dalam kerangka tata kelola yang menyeimbangkan fungsi pelayanan publik dengan pengelolaan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.

7. KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian maupun publikasi artikel ini.

Pustaka

Dwiyanto, A. (2017). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 3 edition.

Miles, M. B., Huberman, A. M., and Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Thousand Oaks, California, 4 edition.